

## ANALISIS SUBSEKTOR UNGGULAN PERTANIAN DI SULAWESI SELATAN

Andi Baso Siswadharma<sup>1</sup>, Nurul Fadilla Burhanuddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin,  
Indonesia, [basosiswadarma10@gmail.com](mailto:basosiswadarma10@gmail.com)

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin,  
Indonesia, [nurulfadillaburhanuddin@gmail.com](mailto:nurulfadillaburhanuddin@gmail.com)

E-mail korespondensi: [nurulfadillaburhanuddin@gmail.com](mailto:nurulfadillaburhanuddin@gmail.com)

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis subsektor unggulan basis ekonomi dalam perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan dan menganalisis subsektor pertanian apa saja yang menjadi subsektor unggulan basis tenaga kerja dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil pencatatan yang sistematis berupa data time series selama 5 tahun yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis *Location Quotient* (LQ). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dari analisis LQ, menunjukkan bahwa subsektor yang merupakan subsektor unggulan pertanian di provinsi Sulawesi Selatan yaitu subsektor perikanan dan penyerapan tenaga kerja, yang menjadi subsektor unggulan di provinsi Sulawesi Selatan yaitu subsektor perikanan dan subsektor kehutanan.

Kata Kunci: Subsektor unggulan pertanian, penyerapan tenaga kerja, sektor basis.

---

### Pendahuluan

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogeneous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Sehingga dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah

mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Potensi daerah satu dengan daerah lainnya pasti berbeda-beda, karena hal ini terkait dengan karakteristik masing-masing daerah tersebut. Meskipun sektor pertanian masih sangat dominan, tetapi kontribusinya terhadap PDRB mengalami penurunan perlahan-lahan. Pada tahun 2015 ke 2016 mengalami kenaikan pada laju pertumbuhan sektor pertanian sampai dengan 7,86% dan mengalami penurunan hingga tahun 2019 sebesar 2,80% ini terjadi akibatnya Sulawesi Selatan mengalami banjir besar yang hampir melanda 13 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yang berdampak pada lahan pertanian seluas kurang lebih 13 hektar contohnya saja daerah Kabupaten Barru dan Kabupaten Sidenreng Rappang dimana dua kabupaten ini memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Selain terjadinya banjir besar, adapun kemarau panjang yang membuat luas lahan panen padi berkurang sampai 15%. Beberapa data di atas menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk meningkatkan lagi sektor unggulan Sulawesi Selatan ini di tahun berikutnya.

Adapun dampak sektor pertanian yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap PDRB Sulawesi Selatan tentunya tidak terlepas dari kontribusi terbesar kelima subsektor pertanian seperti subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan jasa pertanian & perburuan. Terutama pada subsektor pertanian tanaman pangan dan subsektor perikanan merupakan penyumbang terbesar terhadap subsektor pertanian yang hampir dari seluruh nilai tambah pertanian meski dari beberapa komoditi subsektor tanaman pangan kontribusinya semakin menurun.

Sektor basis adalah yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (*Competitive Advantage*) yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau *service industries*.

Sewaktu membahas perdagangan antara dua negara, dalam teori tersebut Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara yang saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan komparatif maka kedua negara tersebut akan beruntung. Ternyata ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional.

Keunggulan komparatif suatu komoditi bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian

unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil.

Pada saat ini istilah yang sering dipakai adalah *competitive advantage* (keunggulan kompetitif). Keunggulan kompetitif menganalisis kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah/luar negeri/pasar global. Istilah keunggulan kompetitif lebih mudah dimengerti, yaitu cukup melihat apakah produk yang dihasilkan bisa dijual di pasar global secara global secara menguntungkan. Hal ini tidak lagi membandingkan potensi komoditi yang sama di suatu negara dengan negara lainnya, melainkan membandingkan potensi komoditi suatu negara terhadap komoditi semua negara pesaingnya di pasar global.

Terkait dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif hal ini dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu: sumber daya alam, teknologi, akses wilayah, pasar, sentra produksi, tenaga kerja, sifat masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Kegiatan basis merupakan kegiatan yang melakukan aktivitas yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) ke luar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Kegiatan non-basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Luas lingkup produksi dan pemasarannya adalah bersifat lokal.

Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*prime mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2008)<sup>1</sup>

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim digunakan adalah kuosien lokasi LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (*leading sectors*).

Analisis LQ dapat menggunakan variabel tenaga kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah (kabupaten) dibandingkan dengan rasio tenaga kerja dan sektor yang sama diprovinsi dimana kabupaten tersebut dalam lingkungannya. (Adisasmita, 2008)<sup>1</sup>

Ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu, entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Adanya peranya sebagai entrepreneur, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis dengan cara pengembangan suatu usaha sendiri atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-

lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi-strategi. Perannya sebagai fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Perannya sebagai stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan outlets untuk produk-produk industri kecil, membantu industri-industri kecil melakukan pameran (Lincoln Arsyad, 2009)<sup>2</sup>

Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*prime mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005)<sup>1</sup>

Teori basis ekonomi ini merupakan faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*) (Arsyad, 2009)<sup>2</sup>

Teori basis ekonomi ini didasarkan pada pemikiran bahwa suatu wilayah harus meningkatkan arus atau aliran langsung dari luar wilayah agar bisa tumbuh secara efektif, yaitu dengan cara meningkatkan ekspor. Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Tiebout yang mengemukakan bahwa pasar ekspor merupakan penggerak utama atau sebagai mesin pertumbuhan ekonomi wilayah. Hasil ekspor mendatangkan pendapatan dan pendapatan tambahan melalui pengaruh pengganda (*multiplier*). Dengan demikian, kegiatan ekspor mengakibatkan pemasukan uang ke dalam wilayah dan dorongan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah.

Permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah) (Arsyad, 2010)<sup>3</sup> Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam

proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja dan merangsang peningkatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dengan mengacu pada sektor unggulan selain berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Sektor unggulan adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja dan prospek yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, demi terciptanya kemandirian pembangunan wilayah. Sektor unggulan dapat pula diartikan sebagai sektor yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar yang ditunjukkan dengan parameter-parameter seperti:

1. Sumbangan sektor perekonomian terhadap perekonomian wilayah yang cukup tinggi.
2. Sektor yang mempunyai *multiplier effect* yang tinggi.
3. Sektor yang kandungan depositnya melimpah.
4. Memiliki potensi *added value* yang cukup baik.

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. Ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu :

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah. Sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Sektor pertanian memang menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia, namun kemiskinan absolut terbanyak juga ada disektor pertanian, dan kemiskinan itu sendiri merupakan hasil interaksi antara teknologi, sumber daya alam, kapital, sumber daya manusia, dan kelembagaan/kebijaksanaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan pembangunan dengan program mengangkat kemiskinan menjadi suatu prioritas, merupakan hal yang sangat tepat

Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia, walaupun sumbangsih nisbi (*relative contribution*) sektor pertanian dalam perekonomian diukur berdasarkan proporsi nilai

tambahnya dalam membentuk produk domestik bruto atau pendapatan nasional tahun demi tahun kian mengecil, hal ini bukanlah berarti nilai dan peranannya semakin tidak bermakna. Nilai tambah sektor pertanian dari waktu ke waktu tetap selalu meningkat, kecuali itu peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja tetap terpenting. Mayoritas penduduk Indonesia, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, hingga saat ini masih menyandarkan mata pencahariaannya pada sektor pertanian.

Secara tradisional peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi dianggap pasif dan hanya sebagai penunjang. Berdasarkan pengalaman sejarah negara-negara barat, pembangunan ekonomi tampaknya memerlukan transformasi struktural ekonomi yang cepat yaitu yang semula mengutamakan kegiatan pertanian menjadi masyarakat yang lebih kompleks dimana terdapat bidang industri dan jasa yang lebih modern. Dengan demikian, peranan utama pertanian adalah menyediakan tenaga kerja dan pangan yang cukup dengan harga yang murah untuk pengembangan industri yang dinamis sebagai sektor penting dalam semua strategi pembangunan ekonomi.

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika para perencanaan dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian itu. Cara itu bisa ditempuh dengan jalan meningkatkan produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan mereka dan atau dengan meningkatkan harga yang mereka terima atas produk-produk yang mereka hasilkan (Arsyad, 2005)<sup>3</sup>

Melihat bahwa sektor pertanian memiliki arti penting dalam pembangunan ekonomi. Misal peranannya dalam pembentukan pendapatan nasional, penyedia lapangan pekerjaan dan kontribusinya dalam perolehan devisa. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi setiap sektor saling terkait termasuk antara sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa.

Sektor pertanian memegang peranan penting di Indonesia sehingga sampai saat ini masih mendominasi pendapatan suatu daerah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring perkembangan zaman kedudukan ini kian menurun kontribusinya dalam pendapatan nasional/regional, digantikan oleh sektor yang lain.

Nugraha (2019)<sup>4</sup> dalam “Analisis Sektor Unggulan untuk Mendorong Pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki sektor unggulannya masing-masing dan untuk mendorong pembangunan wilayah pemerintah

setempat harus memaksimalkan dan mengutamakan sektor unggulan di setiap kabupaten/kota dalam upaya untuk meningkatkan PDRB.

Sapriadi dan Hasbiullah (2015)<sup>5</sup> dalam “Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bulukumba” Hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada penelitian tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil analisis per sektor, hanya terdapat satu sektor yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Bulukumba dengan kriteria tergolong ke dalam sektor basis dan memiliki nilai keunggulan kompetitif yang positif yaitu, sektor jasa-jasa dengan nilai LQ sebesar 1,36 ( $LQ > 1$ ) dan nilai komponen keunggulan kompetitif (Cij) yang positif menunjukkan sektor ini mempunyai daya saing yang tinggi di tingkat provinsi, sehingga pertumbuhannya di daerah lebih cepat dari provinsi.

Ningsih (2010)<sup>6</sup> dalam “Analisis Komoditi Unggulan Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo Sebelum dan Selama Otonomi Daerah” Berdasarkan hasil perhitungan analisis LQ sebelum pelaksanaan otonomi daerah tahun 1997-2000, dapat diketahui komoditi yang teridentifikasi sebagai komoditi basis yaitu subsektor tanaman bahan makanan terdiri dari padi, kacang tanah, kedelai dan subsektor perkebunan adalah mete, dan subsektor peternakan terdiri dari kambing dan kerbau.

Marshall (2015)<sup>7</sup> dalam “Analisis Penentuan Sektor Unggulan Atas Dasar Penyerapan Tenaga Kerja Studi Kasus di Kota Manado Tahun 2008-2013” Dalam penelitian ini memakai analisis LQ dan *Shift Share*, dari hasil perhitungan LQ terhadap penyerapan tenaga kerja yang menjadi sektor unggulan di Kota Manado yaitu : sektor keuangan, sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, sektor industri, sektor konstruksi, dan diikuti sektor listrik, gas. Sedangkan, analisis perhitungan *Shift Share* yang mempunyai pertumbuhan daya saing yaitu : sektor perdagangan dan sektor keuangan.

Rezki (2012)<sup>8</sup> dalam “Analisis Komoditas Unggulan Regional Sektor Pertanian Di Sulawesi Selatan Tahun 2000-2009” Dalam penelitian ini bahasa hasil analisis *Shift Share* diperoleh bahwa sektor pertanian yang mempunyai keunggulan kompetitif yang berpengaruh positif adalah subsektor peternakan yang memiliki pertumbuhan yang cepat dengan daya saing wilayah yang sangat kuat, subsektor perkebunan dan subsektor perikanan memiliki pertumbuhan yang cepat tetapi daya saing wilayah yang lemah, adapun yang memiliki pertumbuhan lambat dan daya saing tinggi adalah subsektor kehutanan, sedangkan subsektor tanaman pangan memiliki pertumbuhan yang lambat dan daya saing wilayah yang lemah.

Mangilep, et. al (2019)<sup>9</sup> menyoroiti pertumbuhan sektoral di Kota Baubau. Dalam penelitian ini memakai analisis LQ, dari hasil perhitungan LQ yang menunjukkan bagian dari Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) Lokal terhadap PDRB regional, dimana penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi hubungan antara Kota Baubau dan daerah pedalamannya untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dari hasil perhitungan LQ terhadap PDRB Kota Baubau periode 2010-2016 yang menjadi sektor dasar adalah sektor jasa dan sektor hotel dan sektor hotel dan restoran itu dikarenakan Kota Baubau ini terkenal dengan destinasi wisatanya yang sangat mengagumkan. Pada PDRB Kabupaten Buton Selatan periode 2010-2016 yang menjadi sektor dasar adalah sektor pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial. Begitupun Pada PDRB Kabupaten Buton utara yang memiliki sektor pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial. Dan terakhir pada PDRB Kabupaten Buton tengah periode 2014-2016 yang menjadi sektor dasar adalah sektor air bersih dan pengelolaan Sampah. Dapat disimpulkan dari hasil LQ beberapa sektor harus lebih ditingkatkan lagi seperti sektor listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor keuangan dan asuransi, sektor real estate, dan sektor jasa pendidikan.

### **Metodologi Kajian**

Penelitian ini mencakup subsektor unggulan sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Ruang lingkup penelitian ini mencakup subsektor unggulan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Ada Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini antara lain berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan, buku-buku dan jurnal-jurnal.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek penelitian, namun melalui dokumen yang digunakan berupa catatan harian, surat kabar, dan referensi lainnya. Khususnya data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2015-2019 yang diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan. Studi pustaka diperoleh dari literatur dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan guna memberikan informasi mengenai penelitian ini.

Pada dasarnya model LQ mengacu pada teori ekonomi basis. Teori ekonomi basis mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh besarnya nilai dari kegiatan ekspor sebuah wilayah. Semakin besar kegiatan ekspor semakin besar kontribusi nilai ekspor terhadap perkembangan kegiatan ekonomi lainnya, demikian halnya sebaliknya.

Metode LQ sendiri merupakan metode yang paling banyak diterapkan untuk mengetahui sektor-sektor basis suatu daerah. Metode ini berkembang sesuai dengan peruntukannya. Beberapa peneliti ataupun perencana menggunakannya dengan maksud untuk mengetahui sektor ataupun komoditas yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan komoditas lainnya, melalui LQ akan teridentifikasi sektor-sektor yang dianggap unggul dan tidak unggul.

Perhitungan LQ sangat sederhana yakni hanya membandingkan peran atau sumbangan sebuah sektor perekonomian daerah dengan sektor perekonomian yang sama pada cakupan daerah wilayah yang lebih luas. Dengan kata lain, LQ adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (kabupaten/kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. Misalnya, *share* sektor pertanian (output) di kabupaten A dibandingkan dengan *share* sektor pertanian di provinsi atau *share* sektor pertanian di kota A dibandingkan dengan *share* sektor pertanian di provinsi. Dapat pula diperbandingkan antara *share* sektor pertanian di daerah A dibandingkan dengan *share* sektor pertanian pada skala nasional.

Adapun rumus untuk LQ adalah:<sup>10</sup>

$$LQ_i = \frac{O_i/O_P}{O_i/O_N}$$

Dimana :

$LQ_i$  = nilai kuosion lokasi sektor i.

$O_i$  = Output sektor i di Provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2015-2019.

$O_P$  = Total Output di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015-2019.

$O_i$  = Output sektor I tingkat nasional pada tahun 2015-2019

$O_n$  = Total Output tingkat nasional paa tahun 2015-2019.

Kriteria penggolongannya adalah sebagai berikut :

1. Jika  $LQ > 1$ , artinya sektor yang ada di daerah tersebut merupakan sektor basis (B) yang mampu mengekspor hasil produksinya ke daerah lain.
2. Jika  $LQ < 1$ , artinya sektor yang ada di daerah tersebut merupakan sektor non basis

(NB) dan cenderung mengimpor dari daerah lain.

3. Jika  $LQ = 1$ , artinya produk domestik yang dimiliki daerah tersebut habis dikonsumsi daerah tersebut.

Ketika sebuah sektor terkategori basis terindikasi bahwa sektor tersebut adalah unggul dibandingkan dengan sektor lainnya (bukan basis). Misalnya jika sektor pertanian di provinsi A setelah dibandingkan sumbangannya terhadap skala Nasional dan memperoleh nilai  $LQ > 1$ , berarti bahwa sektor pertanian dapat dikategorikan sebagai sektor basis dan olehnya itu biasa dikategorikan sebagai sektor unggulan di provinsi tersebut.

### Hasil Kajian dan Diskusi

Pembangunan nasional maupun pembangunan daerah berdampak pada peningkatan sektor-sektor perekonomian yang menghasilkan lapangan kerja baru dan dengan sendirinya dapat menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting dalam pembangunan suatu daerah, maksudnya penyerapan tenaga kerja mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.

**Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja Pertanian Menurut Subsektor Pertanian Nasional**

Subsektor Pertanian	2015	2016	2017	2018	2019
Tanaman pangan	15,416,748	15,779,402	14,443,677	13,161,165	12,642,913
Hortikultura	3,168,195	3,298,616	3,180,006	3,318,583	3,307,930
Perkebunan	12,826,623	11,932,443	11,896,716	11,860,248	11,434,457
Peternakan	3,856,839	4,078,362	3,839,162	4,766,119	4,483,213
Perikanan	6,443,191	6,539,882	6,563,552	6,238,123	4,902,293
Kehutanan	38,205	38,390	41,503	55,972	55,302
<b>Total</b>	<b>41,749,801</b>	<b>41,667,095</b>	<b>39,964,616</b>	<b>39,400,210</b>	<b>36,826,108</b>

Sumber : BPS Sulsel (2020)

Jumlah tenaga kerja yang terserap pada tiap sektor perekonomian suatu daerah menunjukkan tingkat pertumbuhan daerah tersebut. Sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar menunjukkan bahwa sektor tersebut mampu menjadi sektor potensial.

Jumlah tenaga kerja setiap subsektor pertanian di Indonesia dari tahun 2015-2019. Tenaga kerja pada subsektor tanaman pangan pada tahun 2015 berjumlah 15,416,748 jiwa. Sedangkan pada tahun 2016 cukup naik dengan jumlah 15,779,402 jiwa. Namun pada tahun 2017 turun sebesar 14,443,677 jiwa, tahun 2018 13,161,165 jiwa dan tahun 2019 semakin menurun dengan 12,642,913. Tenaga kerja subsektor hortikultura pada tahun 2015-2019 juga mengalami penurunan dan kenaikan seperti pada tahun 2015 sebesar 3,168,195 jiwa dan kenaikan tenaga kerja terjadi pada tahun 2018-2019 dimana tahun 2018 sebesar 3,318,583 jiwa dan tahun 2019 3,307,930 jiwa. Tenaga kerja subsektor perkebunan dari tahun 2015 berjumlah 12,826,623 jiwa dan dari tahun 2016-2019 mengalami penurunan seperti pada tahun 2019 berjumlah 11,434,457 jiwa. Tenaga kerja subsektor peternakan pada tahun 2015 berjumlah 3,856,839 jiwa dan naik pada tahun 2016 sebesar 4,078,362 jiwa dan cukup naik pada tahun 2019 sebesar 4,483,213 jiwa. Pada subsektor perikanan tenaga kerja pada tahun 2015-2019 mengalami perbedaan yang cukup drastis dikarenakan pada tahun 2015 naik sebesar 6,550,641 jiwa sedangkan pada tahun 2019 turun sebesar 4,902,293 jiwa. Begitu pula pada tenaga kerja subsektor kehutanan pada tahun 2015-2019 selalu meningkat yaitu sebesar tahun 2015 berjumlah 38,390 jiwa dan 2016 sebesar 41,503 jiwa, hingga pada tahun 2019 naik sampai dengan 55,302 jiwa.

**Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja Pertanian Menurut Subsektor Pertanian Sulawesi selatan**

<b>SubSektor Pertanian</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Tanaman Pangan</b>	689,047	126,494	689,188	694,386	671,622
<b>Hortikultura</b>	84,851	25,021	94,254	99,202	77,284
<b>Perkebunan</b>	388,454	252,703	308,897	298,016	258,630
<b>Peternakan</b>	138,237	16,960	130,884	157,567	159,317
<b>Perikanan</b>	538,934	467,526	480,387	524,218	406,743
<b>Kehutanan</b>	3,925	913	1,798	3,185	3,372
<b>Total</b>	1,843,448	889,617	1,705,408	1,776,574	1,576,968

Sumber : BPS Sulsel (2020)

Jumlah tenaga kerja setiap subsektor pertanian di Indonesia dari tahun 2015-2019. Tenaga kerja pada subsektor tanaman pangan pada tahun 2015 berjumlah 689,047 jiwa. Sedangkan pada tahun 2016 turun dengan jumlah 126,494 jiwa. Namun pada tahun 2017 naik sebesar 689,188 jiwa, tahun 2018 694,386 jiwa dan tahun 2019 menurun dengan 671,622 . Tenaga kerja subsektor hortikultura pada tahun 2015-2019 juga mengalami penurunan dan kenaikan seperti pada tahun 2015 sebesar 84,851 jiwa dan kenaikan tenaga kerja terjadi pada tahun 2017-2018 dimana tahun 2017 sebesar 94,254 jiwa dan tahun 2018 99,202 jiwa. Tenaga kerja subsektor perkebunan dari tahun 2015 berjumlah 388,454 jiwa dan dari tahun 2016-2019 mengalami penurunan seperti pada tahun 2019 berjumlah 258,630 jiwa. Tenaga kerja subsektor peternakan pada tahun 2015 berjumlah 138,237 jiwa dan turun pada tahun 2016 sebesar 16,960 jiwa dan naik pada tahun 2019 sebesar 159,317 jiwa. Pada subsektor perikanan tenaga kerja pada tahun 2015-2019 mengalami perbedaan yang cukup drastis dikarenakan pada tahun 2015 naik sebesar 538,934 jiwa sedangkan pada tahun 2019 turun sebesar 406,743 jiwa. Begitu pula pada tenaga kerja subsektor kehutanan pada tahun 2015-2019 yang mengalami penurunan dan kenaikan seperti tahun 2015 berjumlah 3,925 jiwa dan 2016 sebesar 913 jiwa, hingga pada tahun 2019 naik sampai dengan 3,372 jiwa.

Penelitian tentang analisis subsektor pertanian di Sulawesi Selatan dilakukan menggunakan data sekunder. Sektor pertanian merupakan suatu sektor ekonomi yang cakupannya cukup luas, karena sektor ini memiliki tujuh subsektor yang terdiri dari subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan, dan perikanan. Untuk menganalisis sektor unggulan pertanian di Sulawesi Selatan dan menganalisis angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode analisis LQ periode perhitungan 2015-2019.

Nilai LQ dapat dikatakan sebagai petunjuk untuk dijadikan dasar untuk menentukan sektor yang potensial untuk dikembangkan, karena sektor tersebut tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di dalam daerah, akan tetapi dapat juga memenuhi di daerah lain atau surplus. Hasil perhitungan LQ provinsi Sulawesi Selatan dari kurun waktu 2015-2019 pada Tabel 1.4. Dari hasil perhitungan indeks *Location Quotient* PDRB provinsi Sulawesi Selatan selama periode pengamatan tahun 2015-2019, maka dapat teridentifikasi sektor-sektor basis dan non basis. Nilai  $LQ > 1$  berarti bahwa peranan suatu sektor di provinsi lebih dominan dibandingkan sektor ditingkat provinsi dan sebagai petunjuk bahwa provinsi surplus akan produk sektor tersebut. Sebaliknya apabila nilai  $LQ < 1$  berarti peranan sektor tersebut lebih kecil di provinsi dibandingkan peranannya di tingkat nasional.

Berdasarkan hasil perhitungan indeks LQ yang disajikan pada tabel 1.4, menunjukkan bahwa terdapat dua sektor basis di provinsi Sulawesi Selatan yaitu, subsektor perikanan dan subsektor tanaman pangan . Hal ini mengindikasikan bahwa pada sektor tersebut provinsi Sulawesi Selatan telah mampu sendiri kebutuhannya dan dimungkinkan mampu mendistribusikan barang produksi pertanian dan perikanan. Sektor perikanan merupakan sektor dengan nilai LQ tertinggi, yakni rata-rata selama lima tahun mencapai 1,924 kemudian diikuti oleh sektor tanaman pangan dengan nilai LQ 1,445. Meskipun sektor basis merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, akan tetapi peran sektor non basis tidak dapat diabaikan begitu saja. karena dengan adanya sektor basis akan dapat membantu mengembangkan sektor non basis menjadi sektor basis baru.

**Tabel 3. Hasil Perhitungan Indeks LQ Subsektor pertanian Provinsi Sulawesi Selatan**

Lapangan Usaha	Nilai LQ					Rerata LQ
	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Tanaman Pangan</b>	1.42	1.44	1.45	1.46	1.46	1.45
<b>Hortikultura</b>	0.53	0.53	0.52	0.47	0.47	0.50
<b>Perkebunan</b>	0.68	0.67	0.65	0.64	0.62	0.65
<b>Peternakan</b>	0.42	0.42	0.42	0.45	0.45	0.43
<b>Perikanan</b>	1.92	1.89	1.90	1.92	1.99	1.92
<b>Kehutanan</b>	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06

Sumber : BPS Sulsel (2020)

Berdasarkan pada hasil perhitungan LQ pada tabel 1.5 diatas maka dapat ditentukan sektor unggulan dan non unggulan di provinsi Sulawesi Selatan terhadap penyerapan tenaga kerja sebagai berikut:

1. Ada tiga subsektor pertanian yang unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja Sulawesi Selatan. Subsektor tersebut, yaitu subsektor perikanan dengan nilai rata-rata sebesar 2,15% dan subsektor kehutanan 1,42%. Dengan nilai LQ lebih dari satu artinya kedua subsektor tersebut menjadi unggulan atau menjadi sumber pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan, serta memiliki keunggulan kompetitif dan subsektor tersebut dapat memenuhi atau mampu menyerap tenaga kerja baru di provinsi Sulawesi Selatan.
2. Ada empat subsektor lain yang termasuk non unggulan yaitu, subsektor tanaman

pangan dengan nilai rata-rata sebesar 0,98%, subsektor hortikultura dengan nilai rata-rata sebesar 0,57%, subsektor perkebunan dengan nilai rata-rata sebesar 0,67%, dan subsektor peternakan dengan nilai rata-rata sebesar 0,67%. Artinya keempat subsektor tersebut tidak menjadi unggulan atau subsektor tersebut tidak mampu menyerap tenaga kerja baru di Sulawesi Selatan.

**Tabel 4. Hasil perhitungan LQ Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sulawesi Selatan**

Lapangan Usaha	Nilai LQ					Rerata LQ
	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Tanaman Pangan</b>	1.012	0.375	1.118	1.170	1.241	0.983
<b>Hortikultura</b>	0.607	0.355	0.695	0.663	0.546	0.573
<b>Perkebunan</b>	0.686	0.992	0.608	0.557	0.528	0.674
<b>Peternakan</b>	0.812	0.195	0.799	0.733	0.830	0.674
<b>Perikanan</b>	1.894	3.348	1.715	1.864	1.938	2.152
<b>Kehutanan</b>	2.327	1.114	1.015	1.262	1.424	1.428

Sumber : BPS Sulsel (2020)

Subsektor dengan tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi di provinsi Sulawesi Selatan adalah Subsektor perikanan. Meningkat besaran nilai LQ pada subsektor perikanan ini tidak lepas dari beberapa faktor seperti pada Kabupaten Bulukumba menjadi pusat pengembangan sektor kelautan dan perikanan dengan terus meningkatkan sumber daya perikanan dan kelautan serta sarana dan prasarana penunjang. Pada Kabupaten Bantaeng dimana pengembangan budidaya rumput laut yang terkenal dengan sektor unggulannya. Kabupaten Kepulauan Selayar dimana pusat pengembangan perikanan laut (perikanan tangkap) serta pengembanagn pariwisata bahari yang banyak dikembangkan dan Kabupaten Jeneponto terenal dengan pengembangan budidaya perikanan dalam hal ini tambak garam yang merupakan sektor unggulannya. Dan dari beberapa faktor tersebut secara langsung menciptakan lapangan kerja baru dengan sendirinya menyerap tenaga kerja. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini melalui dinas/instansi terkait dapat merumuskan kebijakan dalam mengedepankan pengembangan subsektor perikanan dan subsektor lainnya yang mempunyai keunggulan komporatif dalam penyerapan tenaga kerja. Sehingga melalui perhatian khusus dari pemerintah, subsektor tersebut dapat berkembang dan menciptakan *Multiplier effect* bagi subsektor yang kurang mempunyai

keunggulan kooperatif dalam menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sesuai dengan fokus pembangunan ekonomi modern yaitu, bukan hanya mengurangi angkatan pengangguran serta kemiskinan tetapi juga menciptakan lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja.

Selain subsektor perikanan dan subsektor kehutanan yang mempunyai keunggulan komparatif dalam menyerap tenaga kerja tetapi tidak sebesar subsektor perikanan. Untuk pemerintah provinsi Sulawesi Selatan diharapkan lebih memperhatikan dan mengembangkan subsektor tersebut, agar bisa lebih unggul komparatif dalam menyerap tenaga kerja di provinsi Sulawesi Selatan.

Dimulainya otonomi pada tahun 2000 membawa kondisi yang memungkinkan bagi peningkatan kinerja perekonomian daerah. Hal ini disebabkan daerah dapat mengatur kegiatan ekonominya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kapasitas atau potensi fiskal daerah. Ketergantungan bantuan dari pusat diminimalkan sehingga PAD (Penapatan Asli Daerah) menjadi keuangan sendiri terbesar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Nilai PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2019 mencapai 504,75 Miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB mengalami kenaikan sebesar 43,03 Miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 461,72 Miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usah dan inflasi.

Bila dibandingkan dengan Nasional, angka tersebut memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB Nasional pada tahun 2019 sekitar 3.19. Hal ini berarti bahwa sumbangan Sulawesi Selatan terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil. Kontribusi ini mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 3.11.

**Tabel 5. PDB Nasional dan PDRB Sulawesi Selatan**

Tahun	PDB Nasional	PDRB Sulsel	Persentase Sulsel terhadap Nasional
2015	11,526,332.8	340,390.2	2.95
2016	12,401,728.5	377,108.9	3.04
2017	13,589,825.7	415,588.2	3.06
2018	14,838,311.5	461,719.4	3.11
2019	15,833,943.4	504,746.80	3.19

Sumber : BPS Sulsel (2020)

Pada pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berhasil di ciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Penggunaan angka atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi. Mulai tahun perhitungan 2010 pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional dihitung menggunakan harga konstan tahun 2010 sebagai tahun dasar.

**Tabel 6. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan**

Tahun	PDRB Berlaku	PDRB Konstan	Pertumbuhan (%)
2015	340,390.21	250,802.99	7.19
2016	377,108.90	269,401.31	7.42
2017	415,588.20	288,814.17	7.21
2018	461,719.48	309,202.40	7.06
2019	504 746,87	330,605.13	6.92
Rata-rata			7.16

Sumber : BPS Sulsel (2020)

Selama periode 2015-2019, aktifitas perekonomian Sulawesi Selatan relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan 7,16 persen pertahun. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang semakin meningkat hingga pada tahun 2015 tumbuh mencapai 7,19 persen, kemudian meningkat pada tahun 2016 tumbuh sekitar 7,42 persen, dan pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencapai angka 7,21, namun di tahun 2018 sedikit melambat dengan tumbuh 7,06 persen. Begitupun pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tuumbuh dengan 6,92 persen.

Sektor pertanian sebagai sektor dominan dalam struktur perekonomian provinsi Sulawesi Selatan memegang peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Sulawesi Selatan sektor pertanian akan terus ditingkatkan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Manfaat lain dari angka PDRB adalah untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah dengan melihat peranan masing sektor terhadap total PDRB.

Tabel 7. Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

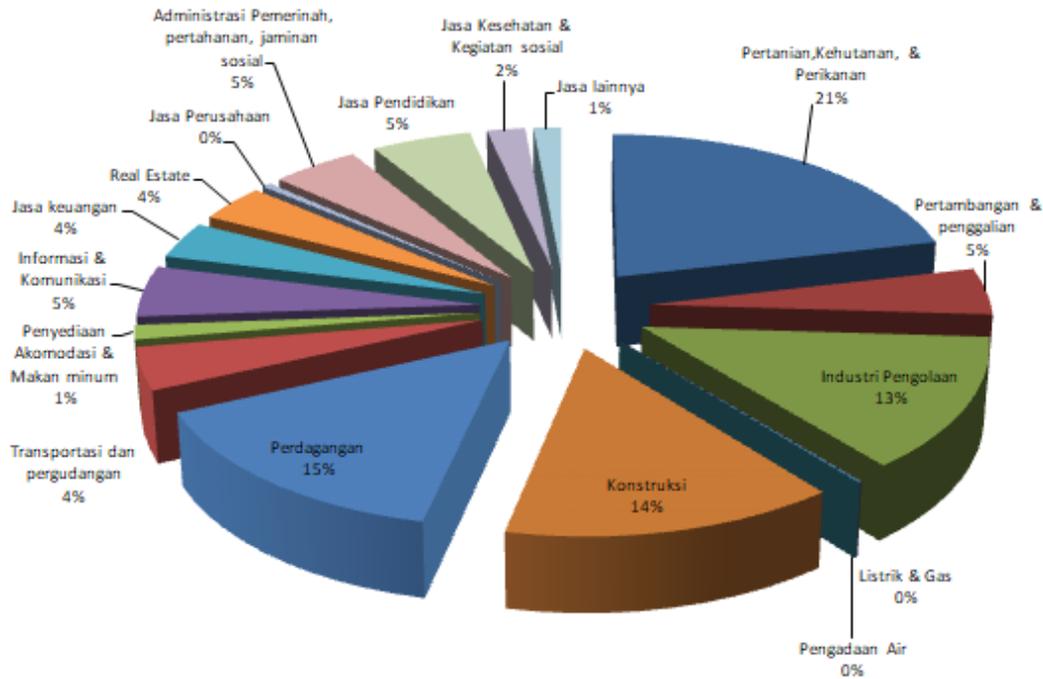
Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	Nasional 2019
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	23.14	23.43	23.13	22.54	21.35	12.71
Pertambangan & penggalian	6.32	5.19	4.91	4.8	4.62	7.26
Industri Pengolaan	13.88	14.06	13.82	12.87	13.17	19.7
Listrik & Gas	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	1.17
Pengadaan Air	0.11	0.1	0.1	0.1	0.09	0.07
Konstruksi	12.39	12.63	12.89	13.55	14.11	10.75
Perdagangan	12.86	13.27	13.71	14.38	14.8	13.01
Transportasi dan pergudangan	4.19	4.29	4.21	4.27	4.21	5.57
Penyediaan Akomodasi & Makan minum	1.34	1.32	1.37	1.41	1.41	2.78
Informasi & Komunikasi	4.62	4.66	4.8	4.93	5.05	3.96
Jasa keuangan	3.6	3.81	3.8	3.74	3.65	4.24
Real Estate	3.99	3.95	3.82	3.71	3.65	2.78
Jasa Perusahaan	0.44	0.44	0.44	0.46	0.47	1.92
Administrasi Pemerintah, pertahanan, jaminan sosial	4.78	4.47	4.38	4.47	4.63	3.61
Jasa Pendidikan	5.08	5.07	5.24	5.29	5.26	3.3
Jasa Kesehatan & Kegiatan sosial	1.91	1.94	1.97	1.99	2.02	1.1
Jasa lainnya	1.28	1.31	1.34	1.41	1.45	1.95

Sumber : BPS Sulsel (2020)

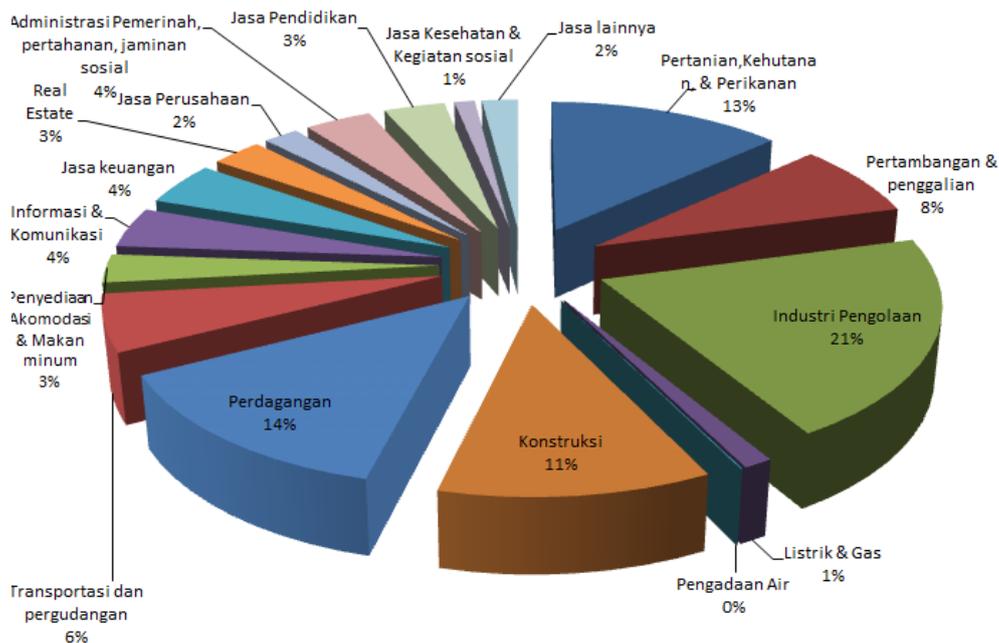
Struktur ekonomi Sulawesi Selatan pada kurun waktu tahun 2015-2019 tidak mengalami pergeseran yang berarti. Peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Sulawesi Selatan masih cukup besar yakni 23 persen di tahun 2015, walaupun terus menurun hingga tahun 2019 menjadi 21 persen.

Selain pertanian, sektor lain yang mempunyai kontribusi cukup besar adalah sektor perdagangan, sektor konstruksi, dan sektor pengolahan yang masing-masing menyumbang 14,80 persen; 14,11 persen; dan 13,17 persen ( pada tahun 2019) terhadap pembentukan total PDRB Sulawesi Selatan sedangkan sektor listri dan gas pada tahun 2019 mempunyai kontribusi yang paling kecil sekitar 0,06 persen.

Gambar 1. Struktur Ekonomi Sulawesi Selatan dan Indonesia



SULAWESI SELATAN



INDONESIA

Sumber : BPS Sulsel (2020)

Bila dicermati lebih dalam, maka kurun waktu tahun 2015-2019 tampak bahwa kontribusi sektor pertanian sejak tahun 2015 mengalami pergeseran dari 23,14 persen menjadi 21,35 persen pada tahun 2019. Salah satu penyebab menurunnya peranan pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Bila dibandingkan antara struktur ekonomi Sulawesi Selatan dengan struktur ekonomi nasional tampak sangat berbeda. Pada tahun 2019 misalnya, sektor primer yang meliputi sektor pertanian dan sektor pertambangan-penggalian pada perekonomian Sulawesi Selatan memberikan kontribusi sekitar 25,97 persen, sedangkan pada perekonomian nasional hanya menyumbang 19,97. Pada sektor sekunder yang meliputi sektor Industri pengolahan, Listrik, Gas, dan Air bersih, dan sektor konstruksi pada perekonomian Sulawesi Selatan hanya menyumbang 27,32 persen sedangkan pada perekonomian nasional memberikan kontribusi sekitar 31,69 persen. Sementara sumbangan dari sektor tersier baik pada perekonomian Sulawesi Selatan maupun perekonomian nasional relatif jauh berbeda yaitu masing-masing sekitar 41,97 persen dan 40,61 persen.

Dengan perkembangan perekonomian Sulawesi Selatan tentunya akan berdampak terhadap peningkatan PDRB per kapita. Namun angka tersebut belum tentu menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka itu hanya merupakan angka rata-rata. Walaupun demikian angka tersebut sudah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

Setiap tahun PDRB per kapita Sulawesi Selatan mengalami peningkatan cukup besar. Dalam lima tahun terakhir misalnya 29,44 juta rupiah pada tahun 2015 menjadi 37,34 juta rupiah pada tahun 2019.

Bila dibandingkan dengan PDB per kapita (Nasional), PDRB per kapita Sulawesi Selatan masih relatif lebih rendah. Pada tahun 2015 misalnya, PDB perkapita Nasional telah mencapai 45,11 juta rupiah dan tahun 2019 telah mencapai angka sekitar 59,07 juta rupiah.

**Tabel 8. PDRB Per Kapita Sulawesi Selatan dan PDB Per kapita Indonesia**

Tahun	PDRB Per Kapita Sulawesi Selatan (Rp)	PDB Per Kapita Indonesia (Rp)
2015	29,44	45,11
2016	31,30	47,95
2017	33,23	51,88
2018	35,24	55,99
2019	37,34	59,07

Sumber : BPS Sulsel (2020)

Sektor ini terdiri dari 7 subsektor yaitu tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan, dan subsektor perikanan. Pertumbuhan riil pada sektor pertanian selama periode 2015-2019 sebagai berikut :

**Tabel 9. Pertumbuhan Riil pada Sektor Pertanian**

Subsektor	2015	2016	2017	2018	2019
Tanaman pangan	1.94	8.83	4.95	3.36	-2.78
Hortikultura	3.47	6.59	4.02	-0.93	3.71
Perkebunan	6.12	7.10	2.15	3.65	-0.01
Peternakan	3.77	7.37	6.12	13.13	7.98
Jasa pertanian dan perburuan	0.85	7.51	8.41	7.23	2.12
Kehutanan	-6.20	-3.72	4.48	3.22	-1.29
Perikanan	11.23	7.75	8.27	7.87	8.76
Sektor Pertanian	3.41	7.97	5.56	3.92	-0.42

Sumber : BPS Sulsel (2020)

Selama periode 2015-2019 pertumbuhan riil masing-masing subsektor terlihat befluktuasi. Pada tahun 2019 subsektor perikanan menempati urutan pertama sebesar 8,76 persen, kemudian urutan kedua subsektor peternakan sebesar 7,98 persen, sementara urutan terakhir subsektor perkebunan sebesar -0,01 persen.

**Tabel 10. Perbandingan Kontribusi Sektor Pertanian Sulawesi Selatan dengan Sektor Pertanian Indonesia**

Tahun	Provinsi Sulawesi Selatan		Kontribusi (%)	Indonesia		Kontribusi (%)
	PDRB Pertanian (Milyar Rp)	PDRB		PDB Pertanian (Milyar Rp)	PDB	
2015	35,830.75	250,802.99	14.29	1,171,445.8	8,982,517.1	0.13
2016	38,687.70	269,401.31	14.36	1,210,955.5	9,434,613.4	0.13
2017	40,314.95	288,814.17	13.96	1,258,375.7	9,912,928.1	0.13
2018	41,894.99	309,202.40	13.55	1,307,373.9	10,425,397.3	0.13
2019	41,718.25	330,605.13	12.62	1,354,957.3	10,949,243.7	0.12
Rata-rata			13.75			0.13

Sumber : BPS Sulsel (2020)

Data pada tabel 10 menunjukkan besarnya perbandingan antara kontribusi sektor pertanian Sulawesi Selatan dengan sektor pertanian Indonesia jika dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan dan pembentukan PDB Indonesia. Dari data tersebut tampak bahwa, besarnya kontribusi sektor pertanian di Sulawesi Selatan terhadap pembentukan PDRB jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDB Indonesia. Rata-rata kontribusi sektor pertanian Sulawesi Selatan terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebesar 13,75 persen, sedangkan untuk rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDB Indonesia selama periode tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebesar 0,13 persen. Perbandingan rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB dan PDB antara Sulawesi Selatan dengan Indonesia menunjukkan perbandingan yang sangat besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan sektor pertanian di Sulawesi Selatan jauh lebih cepat daripada rata-rata pertumbuhan sektor pertanian secara nasional. Perbedaan kontribusi PDRB sektor pertanian Sulawesi Selatan dengan kontribusi PDB sektor pertanian Indonesia terjadi karena nilai PDRB Sulawesi Selatan didominasi oleh sektor pertanian sehingga kontribusi cukup tinggi. Sedangkan nilai

PDB Indonesia hanya sedikit yang mendominasi oleh sektor pertanian sehingga menyebabkan kontribusi cukup rendah.

### **Penutup**

Berdasarkan hasil analisis yang di dapat dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa: 1) berdasarkan hasil perhitungan dari analisis LQ, menunjukkan bahwa subsektor yang merupakan subsektor unggulan pertanian di provinsi Sulawesi Selatan yaitu subsektor perikanan; 2) sedangkan dari hasil perhitungan LQ terhadap penyerapan tenaga kerja, yang menjadi subsektor unggulan di provinsi Sulawesi Selatan yaitu subsektor perikanan dan subsektor kehutanan.

Dengan demikian dapat diberikan saran: 1) untuk memacu perekonomian provinsi Sulawesi Selatan terutama pada bidang sektor pertanian, maka pemerintah daerah sebaiknya fokus pada subsektor pertanian pada subsektor unggulan yaitu subsektor perikanan; 2) Subsektor perikanan dan subsektor kehutanan menjadi subsektor unggulan dalam menyerap tenaga kerja karena memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta banyak menyerap tenaga kerja dan diharapkan pemerintah perlu pengembangan lebih lanjut subsektor ini dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

### **Referensi**

- [1] Adisasmita, R. (2008). Pengembangan wilayah: Konsep dan teori. *Yogyakarta: Graha Ilmu*. <https://perpustakaan.setneg.go.id/>
- [2] Arsyad, L., 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta : BPF. <https://repository.unair.ac.id/>
- [3] Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima. *Yogyakarta: UPP STIE YKPN*. <http://etd.repository.ugm.ac.id>
- [4] Akmal A. N., (2019). Analisis Sektor Unggulan Untuk Mendorong Pembangunan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral dissertation, undip vokasi).
- [5] Sapriadi, S., & Hasbiullah, H. (2015). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Iqtisaduna*, 1(1), 53-71.
- [6] Ningsih, E. S. M. (2010). *Analisis komoditi unggulan sektor pertanian Kabupaten Sukoharjo sebelum dan selama otonomi daerah* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

- [7]Dedifu, M. (2015). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Atas Dasar Penyerapan Tenaga Kerja Studi Kasus di Kota Manado Tahun 2008-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3).
- [8]Rezki K. D (2012) dalam “Analisis Komoditas Unggulan Regional Sektor Pertanian Di Sulawesi Selatan Tahun 2000-2009”
- [9]Mangilep, M. A. A., Anwar, A. I., & Mangilep, A. U. A. (2019, August). The Economic Development of Bau Bau City and the Strengths of its Hinterland. In *3rd International Conference on Accounting, Management and Economics 2018 (ICAME 2018)* (pp. 616-623). Atlantis Press.
- [10]Nursini (2010). Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah, Teori Dan Aplikasi. *Jurnal Penelitian* (45).  
<https://scholar.google.co.id/citations?user=HOpr8a0AAAAJ&hl=id>
- [11] BPS Sulsel (2020). Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan.